BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik, menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh publik adalah informasi mengenai pengelolaan keuangan pada organisasi sektor publik. Informasi mengenai pengelolaan dana atau keuangan publik tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan, (Mahsun dkk, 2006: 123).

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun ekternal. Hariadi (2010: 1255) menjelaskan laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keungan, realiasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Chabib dan Heru, (2010) menjelaskan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas pemerintahan dan sekaligus merupakan salah satu tolak ukur kinerja *financial* pemerintah. Bagi pihak eksternal laporan keuangan yang berisi informasi keuangan akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Sementara bagi pihak internal laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk penilaian kinerja (Darise, 2008: 2).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa laporan keuangan disusun dalam rangka membantu para pengguna untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan sekaligus untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya ditujukan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas, hal ini juga

diungkapkan oleh Mardiasmo (2003) bahwa pemerintah dituntut harus mampu menyajikan informasi keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan.

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Agar laporan keuangan daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki maka laporan keuangan tersebut harus relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, (PP No. 71 tahun 2010). Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi yang andal dan relevan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Seperti yang diungkapkan oleh Murysidi (2009) laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan, maka untuk memenuhi tujuan tersebut laporan keuangan harus memiliki kualitas.

Informasi dalam laporan keuangan yang disajikan pemerintah dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai dan informasi tersebut harus mempunyai nilai. Nilai informasi dalam laporan keuangan dapat memberikan keyakinan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut benar atau valid, serta ketersedian informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan

sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

Untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan tentunya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah implementasi pengelolaan keuangan. Sebagaimana disampaikan oleh Charolina, dkk (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah implementasi pengelolaan keuangan. Hal ini juga dijelaskan oleh Mahmudi (2007: 27) bahwa kualitas dari hasil (*outcome*) pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus pengelolaan pada setiap tahap, baik tahap perencanaan, implementasi maupun pelaporan. Jadi pengelolaan keuangan daerah itu supaya berkualitas tergantung pada setiap tahap pengeleloaannya salah satunya dilihat dari hasil tahap pelaporannya.

Menurut Halim (2007: 330), pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan harus transparansi yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kemudian, *value for money* yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Dengan adanya

penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan tersebut, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sehingga nantinya akan melahirkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat (Hidayat, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula, yang artinya bahwa pengelolaan keuangan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, hal ini telah dibuktikan oleh penelitian dari Charolina (2013) bahwa implementasi pengelolaan keuangan memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan pada KPU se Provinsi Bengkulu. Penelitian Dewi, dkk (2014) hasil dari penelitiannya tersebut membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan pada 10 SKPD di Kabupaten Jembrana, semakin baik pengelolaan keuangan maka informasi dalam laporan keuangan pada pemerintah tersebut akan semakin berkualitas. Berbagai penelitian tersebut ditegaskan juga oleh teori dari Mardiasmo (2002) bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan keuangan menjadi salah satu faktor penentu kualitas laporan keuangan pemerintah dalam mewujudkan manajemen pemerintah yang akuntabel.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh implementasi pengelolaan keuangan, dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang baik pada pemerintah tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kualitas laporan keuangan sebagaimana uraian diatas dapat dipengaruhi oleh seberapa baik implementasi pengelolaan keuangan, terkait dengan pengelolaan keuangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya proses pengelolaan keuangan itu dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan, semua proses tersebut harus bisa dijalankan oleh sebuah organisasi agar bisa mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi tersebut. Proses pengelolaan keuangan dimulai dengan proses perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan belanja, begitu juga pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, implementasi pengelolaan keuangan dapat dilihat dari presentasi capaian anggaran pendapatan belanja sebagaimana yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran, adapun presentasi capaian realisasi belanja pada Komisi Pemilihan Umum provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

TABEL 1: CAPAIAN REALISASI BELANJA KPU PROVINSI GORONTALO

TAHUN	ANGGARAN	REALIASI	REALISASI DIBAWAH/DIATAS ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
2013	Rp 11,674,086,000	Rp 8,368,256,091	Rp (3,305,829,909)	71.68%
2014	Rp 12,545,516,000	Rp 10,082,271,330	Rp (2,463,244,670)	80.37%
2015	Rp 9,173,930,000	Rp 7,951,618,719	Rp (1,222,311,281)	86.68%

Sumber: Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa implementasi pengelolaan keuangan pada KPU Provinsi Gorontalo belum berjalan dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari presentase capaian realisasi anggaran tiap tahunnya mencapai rata-rata dibawah 90%, dari tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2014 terjadi peningkatan anggaran namun realisasinya belum mencapai anggaran yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2015 anggaran yang ditetapkan menurun dari tahun sebelumnya namun sama seperti tahun sebelumnya bahwa realisasi dari anggaran pada tahun 2015 juga belum mencapai anggaran yang ditargetkan. Berdasarkan hal tersebut mengindikasikan bahwa implementasi pengelolaan keuangan pada KPU Provinsi Gorontalo belum berjalan dengan optimal yang mana didalam proses awal perencanaan dan penganggaran itu kurang memadai dan tidak optimal. Belum optimalnya implementasi pengelolaan keuangan tentunya akan berdampak buruk pada pelaporan keuangan KPU tersebut.

Beberapa teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya mengatakan apabila implementasi pengelolaan keuangan yang tidak berjalan dengan optimal akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan KPU Provinsi Gorontalo tersebut tentunya akan berdampak pada penyajian laporan keuangan KPU, hal ini terbukti dari informasi yang diperoleh bahwa laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo dinilai wajar dengan pengecualian (WDP) oleh badan pemeriksa keuangan (BPK). Adapun alasan lain kenapa BPK masih memberikan opini WDP atas laporan keuangan KPU, hal ini dikarenakan

pada saat pemeriksaan terdapat SPJ yang belum lengkap karena adanya keterlambatan Satker KPU Kabupaten dan Kota dalam penyampaian laporan keuangan ke KPU Provinsi Gorontalo, selain itu keterlambatan satker dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK maupun inspektorat.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui pengaruh implementasi pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada KPU Provinsi Gorontalo peneliti ingin menguji "**Pengaruh Implementasi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada KPU Provinsi Gorontalo"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengidentifkasikan masalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya pengelolaan keuangan KPU Provinsi Gorontalo, hal ini terlihat dari capaian realisasi anggaran selama tiga tahun terakhir yang kurang dari 90%.
2. Laporan keuangan KPU masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP), hal ini dikarenakan pada saat pemeriksaan ada SPJ yang belum lengkap karena adanya keterlambatan pemasukan SPJ dari satker KPU Kabupaten/Kota.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo?

2. Bagaimana kualitas laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo?
3. Apakah implementasi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengaruh implementasi pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya mengenai pengelolaan keuangan dan kualitas laporan keuangan. Serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak lain yang akan tertarik akan masalah yang ada di angkat untuk diteliti lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

   Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pemikiran dan sebagai bahan evaluasi yang selanjutnya dapat menjadi sebuah bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan bagi KPU Provinsi Gorontalo.